PEMERINTAH KABUPATEN KEDIRI
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jalan Soekarno Hatta Nomor 14
Telepon. (0354) 681227, 681741, Pos.el : dpmptsp@kedirikab.go.id
Laman: www.kedirikab.go.id

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
NOMOR : 000.8.6.3/ 3921 /418.27/2025
TENTANG
INDIKATOR KINERJA UTAMA DAN INDIKATOR KINERJA
DI LINGKUP DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP) KABUPATEN KEDIRI TAHUN 2025-2029

KEPALA DPMPTSP,

Menimbang	:	a.	bahwa salah satu upaya untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja Pemerintah Kabupaten Kediri adalah dengan ditetapkannya Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja sebagai dasar pengukuran keberhasilan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan;
		b.	bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, bahwa setiap Instansi Pemerintah wajib menetapkan Indikator Kinerja Utama di lingkungan masing-masing;
		c.	bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Kepala DPMPTSP tentang Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja di Lingkup DPMPTSP Kabupaten Kediri;

Mengingat	:	1.	Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

		2.	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
		3.	Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
		4.	Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja instansi Pemerintah (SAKIP);
		5.	Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
		6.	Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
		7.	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018.
		8.	Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
		9.	Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
		10.	Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2025-2029
		11.	Peraturan Bupati Kediri Nomor 40 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kediri

MEMUTUSKAN

Menetapkan	:	
KESATU	:	Menetapkan Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja di Lingkup OPD sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala OPD ini
KEDUA	:	Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, bertujuan untuk: a. Memberikan informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam penyelenggaraan manajemen dan akuntabilitas kinerja yang baik; dan b. Memberikan informasi pengukuran keberhasilan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja organisasi.
KEEMPAT	:	Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja OPD Kabupaten Kediri dimanfaatkan untuk: a. Perencanaan Strategis; b. Perencanaan Tahunan; c. Pengukuran Kinerja; d. Penetapan Kinerja; e. Perjanjian Kinerja; f. Pelaporan Kinerja; g. Evaluasi Kinerja Instansi Pemerintah; h. Pemantauan dan Pengendalian Kinerja Pelaksanaan Program dan Kegiatan; i. Dokumen Akuntabilitas Kinerja lainnya sesuai Peraturan Perundang-Undangan.
KEEMPAT	:	Keputusan Kepala OPD ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kediri
pada tanggal 30 - 09 - 2025

KEPALA DPMPTSP
KABUPATEN KEDIRI

JOKO SUWONO

PEMERINTAH KABUPATEN KEDIRI
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jalan Soekarno Hatta Nomor 14
Telepon. (0354) 681227, 681741, Pos.el : dpmptsp@kedirikab.go.id
Laman: www.kedirikab.go.id

BERITA ACARA
NOMOR : 000.8.6.3/ 3922 /418.27/2025
TENTANG
HASIL RAPAT PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DAN INDIKATOR KINERJA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU TAHUN 2025-2029

Pada hari ini, Selasa 30 September 2025 bertempat di Ruang Rapat DPMPTSP, disampaikan hasil rapat penyusunan Penetapan Rencana Aksi Capaian Kinerja DPMPTSP Kabupaten Kediri sebagai berikut;

Dasar Rapat
1. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

Pimpinan Rapat
1. Kepala DPMPTSP Kabupaten Kediri

Peserta Rapat
1. Pejabat Struktural di Lingkup DPMPTSP Kabupaten Kediri
2. Pejabat Fungsional di Lingkup DPMPTSP Kabupaten Kediri
3. Pejabat Pelaksana di Lingkup DPMPTSP Kabupaten Kediri

Pembahasan
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, bahwa setiap Instansi Pemerintah wajib menetapkan Indikator Kinerja Utama di lingkungan masing-masing.

Hasil Rapat
Dari hasil rapat diatas, peserta rapat menyepakati disusunnya Keputusan Kepala DPMPTSP Kabupaten Kediri terkait Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja DPMPTSP Kabupaten Kediri Tahun 2025-2029.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yang Menyetujui Hasil Rapat :

1	Sekretaris DPMPTSP Kabupaten Kediri **Ir. ROOSANA TRI K, M.M.**	1. .....
2	Koordinator Tim Penanaman Modal **DEVIN MARSFIAN S., S.E., M.Si.**	2. .....
3	Koordinator Tim Pelayanan Terpadu Satu Pintu **TOTOK SUBAWA S.Sos.**	3. .....
4	Perencana Ahli Muda **YUDHA R. KURNIAWATI, S.IP.**	4. .....

Mengetahui,
Kepala DPMPTSP Kabupaten Kediri

JOKO SUWONO, S.Sos., M.AP.
Pembina Utama Muda
NIP 197501031993111001

Lampiran I
Nomor : 000.8.6.3/ 3921 /418.27/2025
Tanggal : 30 September 2025

Indikator Kinerja Utama DPMPTSP Kabupaten Kediri

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Tugas : membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.

Fungsi :

1. perumusan kebijakan teknis di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
2. penyusunan perencanaan program dan anggaran di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu
3. pelaksanaan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
4. pemantauan, evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
5. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
6. pembinaan penyelenggaraan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
7. pelaksanaan administrasi di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
8. penyusunan dan perumusan laporan kinerja secara periodik kepada Bupati; dan
9. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan perundang-undangan.

Tabel 1.1 Indikator Kinerja Utama DPMPTSP Kabupaten Kediri

Tujuan/Sasaran Terseleksi	**Indikator**	**Definisi Operasional / Kamus Indikator**	**Formula**	**Sumber Data (Sumber Verifikasi)**	**Penanggung-Jawab**
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
Meningkatnya Kinerja Penanaman Modal di Daerah	Nilai Realisasi Investasi di Kabupaten/ Kota (Juta Rupiah)	Nilai total investasi yang telah terealisasi di kabupaten/kota dalam periode waktu tertentu, yang berasal dari penanam modal dalam negeri (PMDN) dan penanam modal asing (PMA).	Nilai realisasi investasi di daerah pada tahun n	Laporan Realisasi Investasi DPMPTSP	DPMPTSP
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Terhadap Pelayanan Perizinan	Nilai yang menggambarkan tingkat kepuasan pengguna layanan perizinan berdasarkan persepsi mereka terhadap kualitas unsur pelayanan yang diterima.	Capaian IKM Penjelasan: Interval penentu mutu pelayanan untuk menetapkan kinerja unit pelayanan tersebut: A (Sangat Baik) : 88,31 – 100,00 B (Baik) : 76,61 – 88,30 C (Kurang Baik) : 65,00 – 76,60 D (Tidak Baik) : 25,00 – 64,99	Laporan SKM DPMPTSP	DPMPTSP

Indikator Kinerja DPMPTSP

1.2 Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran

Tabel 1.2 Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran DPMPTSP

Tujuan/Sasaran	Indikator	Definisi Operasional	Formula	Sumber Data (Sumber Verifikasi)	Penanggung-Jawab
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
Meningkatkan investasi di daerah	Persentase peningkatan investasi di kabupaten/kota	Persentase yang menunjukkan perubahan nilai realisasi investasi (Penanaman Modal Dalam Negeri/PMDN dan Penanaman Modal Asing/PMA) pada suatu periode dibandingkan dengan periode sebelumnya	Realisasi Investasi Tahun (n) - Realisasi Investasi Tahun (n-1) / Realisasi Investasi Tahun (n-1) x 100%	Laporan Realisasi Investasi DPMPTSP	DPMPTSP
Meningkatnya Kinerja Penanaman Modal di Daerah	Nilai Realisasi Investasi di Kabupaten/ Kota (Juta Rupiah)	Nilai total investasi yang telah terealisasi di kabupaten/kota dalam periode waktu tertentu, yang berasal dari penanam modal dalam negeri (PMDN) dan penanam modal asing (PMA).	Nilai realisasi investasi di daerah pada tahun (n)	Laporan Realisasi Investasi DPMPTSP	DPMPTSP

Tujuan/Sasaran	Indikator	Definisi Operasional	Formula	Sumber Data (Sumber Verifikasi)	Penanggung-Jawab
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Terhadap Pelayanan Perizinan	Nilai yang menggambarkan tingkat kepuasan pengguna layanan perizinan berdasarkan persepsi mereka terhadap kualitas unsur pelayanan yang diterima.	Capaian IKM Penjelasan: Interval penentu mutu pelayanan untuk menetapkan kinerja unit pelayanan tersebut: A (Sangat Baik) : 88,31 – 100,00 B (Baik) : 76,61 – 88,30 C (Kurang Baik) : 65,00 – 76,60 D (Tidak Baik) : 25,00 – 64,99	Laporan SKM DPMPTSP	DPMPTSP

1.3 Indikator Kinerja Program

Tabel 1.3 Indikator Kinerja Program DPMPTSP

Program	Indikator	Definisi Operasional	Formula	Sumber Data (Sumber Verifikasi)	Penanggung-Jawab
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase yang menunjukkan tingkat keberhasilan suatu unit kerja dalam memberikan dukungan (baik berupa sarana, prasarana, administrasi, kepegawaian, keuangan, maupun teknis) agar urusan-urusan pokok pemerintahan	Σ realisasi pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah/ Target pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah x100%	Laporan Kegiatan	SEKRETARIAT
Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Persentase Realisasi Investasi	Kinerja yang membandingkan besarnya nilai investasi yang secara fisik terealisasi di lapangan dalam periode tertentu dengan nilai investasi yang	Σ realisasi investasi tahun (n)/ Target realisasi tahun (n) x 100%	Laporan Realisasi Investasi DPMPTSP	TIM PENANAMAN MODAL

Program	Indikator	Definisi Operasional	Formula	Sumber Data (Sumber Verifikasi)	Penanggung-Jawab
		direncanakan atau ditargetkan dalam periode yang sama			
Program Promosi Penanaman Modal	Persentase Peningkatan Minat Investor yang Berinvestasi	Nilai yang menggambarkan pertumbuhan atau perubahan tingkat ketertarikan calon investor (baik domestik maupun asing) untuk menanamkan modalnya di suatu wilayah selama periode waktu tertentu	Σ investor yang berminat/ total target investor sasaran promosi dalam 5 tahun x 100%	Laporan Kegiatan Tim Penanaman Modal	TIM PENANAMAN MODAL
Program Pelayanan Penanaman Modal	Persentase Pelaku Usaha yang Memperoleh Izin Sesuai Ketentuan	Nilai yang menggambarkan sejauh mana pelaku usaha berhasil mendapatkan perizinan berusaha dari pemerintah (daerah/pusat) secara lengkap, benar, dan memenuhi seluruh persyaratan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, serta	Σ Izin yang telah diterbitkan/ Σ Permohonan masuk x 100%	Laporan dari oss.go.id	TIM PTSP

Program	Indikator	Definisi Operasional	Formula	Sumber Data (Sumber Verifikasi)	Penanggung-Jawab
		diterbitkan dalam waktu yang telah ditetapkan			
Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Persentase Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi Pelaku Usaha dalam Membuka Usaha	Nilai yang menggambarkan efektivitas pemerintah dalam menangani, memediasi, dan menyelesaikan berbagai kendala yang dilaporkan oleh pelaku usaha (calon maupun existing) selama proses memulai dan mengoperasikan usahanya	Σ Permasalahan yang terselesaikan/ Σ Pengajuan Permasalahan yang masuk x 100%	Laporan Kegiatan Tim Penanaman Modal	TIM PENANAMAN MODAL
Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Persentase Pemanfaatan Data dan Informasi Penanaman Modal	Nilai yang menggambarkan sejauh mana data dan informasi terkait penanaman modal (seperti realisasi investasi, sektor unggulan, profil investor, dan potensi wilayah) diakses, digunakan, dan diterapkan secara efektif oleh	Σ Pemanfaatan Data dan Informasi Penanaman Modal yang terealisasi/ Target Pemanfaatan Data dan Informasi Penanaman Modal x 100%	Laporan Kegiatan Tim PTSP	TIM PTSP

Program	Indikator	Definisi Operasional	Formula	Sumber Data (Sumber Verifikasi)	Penanggung-Jawab
		pemangku kepentingan (stakeholders) untuk mendukung pengambilan keputusan strategis, perumusan kebijakan, dan aksi nyata dalam bidang penanaman modal.			

1.4 Indikator Kinerja Kegiatan

Tabel 1.4 Indikator Kinerja Kegiatan DPMPTSP

Kegiatan	Indikator	Definisi Operasional	Formula	Sumber Data (Sumber Verifikasi)	Penanggung-Jawab
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	jumlah dokumen yang disusun oleh Perangkat Daerah dalam satu tahun anggaran, yang secara formal mengatur dan mendokumentasikan proses perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja.	Σ (Renja dan Perubahan Renja) + Σ (Dokumen LKPJ dan IKK) + Σ (Dokumen LKjIP, RB TEMATIK, Monev Triwulan 1, 2, 3, 4)	Laporan Kegiatan Sekretariat	SEKRETARIAT
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi keuangan perangkat daerah	Jumlah dokumen laporan yang disusun oleh Perangkat Daerah yang mempertanggung jawabkan seluruh transaksi dan pengelolaan keuangan daerah mulai dari pelaksanaan anggaran, pencatatan, hingga pelaporan keuangan dalam periode satu tahun	Σ (Laporan Gaji dan Tunjangan+ Laporan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN+ Laporan keuangan akhir tahun)	Laporan Kegiatan Sekretariat	SEKRETARIAT

Kegiatan	Indikator	Definisi Operasional	Formula	Sumber Data (Sumber Verifikasi)	Penanggung-Jawab
		tertentu			
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	Jumlah dokumen laporan formal yang disusun oleh Unit Kerja atau Kuasa Pengguna Barang (KPB) dalam suatu Perangkat Daerah yang memuat informasi mengenai status, nilai, mutasi, dan kondisi dari seluruh barang/inventaris yang dikuasai dan dikelolanya.	Σ (Laporan administrasi BMD Semester 1 + Laporan administrasi BMD Semester 2)	Laporan Kegiatan Sekretariat	SEKRETARIAT
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	tingkat pencapaian dalam menyelesaikan seluruh tugas dan proses administrasi kepegawaian yang menjadi kewajiban suatu Perangkat Daerah dalam periode satu tahun	(Jumlah Pegawai yang Mendapatkan Diklat / Total Pegawai yang Ditargetkan Diklat) x 100%	Laporan Kegiatan Sekretariat	SEKRETARIAT
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	tingkat pencapaian dalam menyelesaikan seluruh tugas dan layanan administrasi umum yang menjadi kewajiban suatu Perangkat Daerah	(Σ (Realisasi Masing-masing Indikator)) / (Σ (Target Masing-masing Indikator)) × 100%	Laporan Kegiatan Sekretariat	SEKRETARIAT

Kegiatan	Indikator	Definisi Operasional	Formula	Sumber Data (Sumber Verifikasi)	Penanggung-Jawab
		untuk mendukung kelancaran operasional dan tata kelola pemerintahan dalam periode satu tahun			
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa Penunjang Urusan Pemerintaah Daerah yang Disediakan	tingkat ketercapaian dalam menyediakan layanan jasa pendukung (penunjang) yang dibutuhkan oleh Perangkat Daerah untuk menjalankan fungsi pemerintahan secara efektif dan efisien dalam periode satu tahun	(Σ (Realisasi Masing-masing Indikator)) / (Σ (Target Masing-masing Indikator)) × 100%	Laporan Kegiatan Sekretariat	SEKRETARIAT
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah (BMD) Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Dipelihara	Jumlah aset berwujud yang dimiliki dan dikuasai oleh Pemerintah Daerah yang berfungsi sebagai sarana pendukung (penunjang) kelancaran penyelenggaraan urusan pemerintahan, yang telah mendapatkan	Σ (BMD Penunjang yang Memiliki Bukti Pemeliharaan)	Laporan Kegiatan Sekretariat	SEKRETARIAT

Kegiatan	Indikator	Definisi Operasional	Formula	Sumber Data (Sumber Verifikasi)	Penanggung-Jawab
		tindakan pemeliharaan dalam periode satu tahun			
Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitasi Penanaman Modal	Jumlah layanan fasilitasi untuk mempermudah, memperlancar, dan mendukung pelaksanaan investasi oleh investor di Kabupaten Kediri dalam periode satu tahun	Σ Kegiatan Fasilitasi Penanaman Modal	Laporan Kegiatan Tim Penanaman Modal	TIM PENANAMAN MODAL
Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Peta potensi dan peluang usaha yang disusun	Total dokumen formal yang berisi hasil identifikasi, analisis, dan pemetaan terhadap sumber daya ekonomi, sektor unggulan, serta prospek investasi di suatu wilayah dalam periode satu tahun	Σ (Dokumen Peta potensi yang Disusun)	Laporan Kegiatan Tim Penanaman Modal	TIM PENANAMAN MODAL
Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kepeminatan investor	total calon penanam modal yang menyatakan ketertarikan, melakukan pertanyaan mendalam, atau	Σ Dokumen kepeminatan investor	Laporan Kegiatan Tim Penanaman Modal	TIM PENANAMAN MODAL

Kegiatan	Indikator	Definisi Operasional	Formula	Sumber Data (Sumber Verifikasi)	Penanggung-Jawab
		mengambil langkah konkret awal untuk menanamkan modalnya di Kabupaten Kediri dalam periode satu tahun			
Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Pelaku Usaha yang Memperoleh Izin Sesuai Ketentuan	Total pelaku usaha yang mendapatkan izin usaha dari DPMPTSP dalam periode satu tahun	Σ Pelaku Usaha yang Memperoleh Izin Sesuai Ketentuan	Laporan Kegiatan Tim PTSP	TIM PTSP
Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pelaku usaha yang menjadi obyek pengendalian penanaman modal	Jumlah pelaku usaha yang kegiatannya dikenakan pengawasan, pemantauan, dan evaluasi khusus oleh Pemerintah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penanaman modal dalam periode satu tahun	Σ pelaku usaha yang menjadi obyek pengendalian penanaman modal	Laporan Kegiatan Tim Penanaman Modal	TIM PENANAMAN MODAL

Kegiatan	Indikator	Definisi Operasional	Formula	Sumber Data (Sumber Verifikasi)	Penanggung-Jawab
Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Data Informasi Penanaman Modal yang Tersedia untuk Publik	rasio antara jumlah jenis informasi penanaman modal yang telah dipublikasikan dan dapat diakses publik terhadap total jenis informasi yang wajib disediakan.	Σ Data yang Tersedia untuk Publik / Σ Total Data yang Seharusnya Tersedia) × 100%	Laporan Kegiatan Tim PTSP	TIM PTSP

1.5 Indikator Kinerja Sub-Kegiatan

Tabel 1.5 Indikator Kinerja Kegiatan DPMPTSP

Sub-Kegiatan	Indikator	Formula	Sumber Data (Sumber Verifikasi)	Penanggung-Jawab
1	*2*	*4*	*4*	*5*
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Σ (Renja dan Perubahan Renja)	Laporan Kegiatan Sekretariat	SEKRETARIAT
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Σ (Dokumen LKPJ dan IKK)	Laporan Kegiatan Sekretariat	SEKRETARIAT
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Σ (Dokumen LKjIP, RB TEMATIK, Monev Triwulan 1, 2, 3, 4)	Laporan Kegiatan Sekretariat	SEKRETARIAT
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Σ (Laporan Gaji dan Tunjangan)	Laporan Kegiatan Sekretariat	SEKRETARIAT
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Σ (Laporan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN)	Laporan Kegiatan Sekretariat	SEKRETARIAT
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Σ (Laporan keuangan akhir tahun)	Laporan Kegiatan Sekretariat	SEKRETARIAT
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Σ Laporan administrasi BMD Semester 1 dan	Laporan Kegiatan Sekretariat	SEKRETARIAT

Sub-Kegiatan	Indikator	Formula	Sumber Data (Sumber Verifikasi)	Penanggung-Jawab
SKPD		Laporan administrasi BMD Semester 2		
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Σ Jumlah Pegawai yang Mendapatkan Diklat	Laporan Kegiatan Sekretariat	SEKRETARIAT
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Σ Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Laporan Kegiatan Sekretariat	SEKRETARIAT
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Σ Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan Kegiatan Sekretariat	SEKRETARIAT
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Σ Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Laporan Kegiatan Sekretariat	SEKRETARIAT
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Σ Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Laporan Kegiatan Sekretariat	SEKRETARIAT
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Σ Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Laporan Kegiatan Sekretariat	SEKRETARIAT
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Σ Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan Kegiatan Sekretariat	SEKRETARIAT

Sub-Kegiatan	Indikator	Formula	Sumber Data (Sumber Verifikasi)	Penanggung-Jawab
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Σ Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Laporan Kegiatan Sekretariat	SEKRETARIAT
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Σ Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan Kegiatan Sekretariat	SEKRETARIAT
Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Σ Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan Kegiatan Sekretariat	SEKRETARIAT
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Σ Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan Kegiatan Sekretariat	SEKRETARIAT
Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Σ Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Laporan Kegiatan Sekretariat	SEKRETARIAT
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Σ Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Laporan Kegiatan Sekretariat	SEKRETARIAT
Penetapan kebijakan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Σ Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Laporan Kegiatan Tim Penanaman Modal	TIM PENANAMAN MODAL

Sub-Kegiatan	Indikator	Formula	Sumber Data (Sumber Verifikasi)	Penanggung-Jawab
Fasilitasi Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Kesepakatan Kemitraan antara Usaha Besar (PMA/PMDN) dengan UMKM di daerah	Σ Kesepakatan Kemitraan antara Usaha Besar (PMA/PMDN) dengan UMKM di daerah	Laporan Kegiatan Tim Penanaman Modal	TIM PENANAMAN MODAL
Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Σ Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Laporan Kegiatan Tim Penanaman Modal	TIM PENANAMAN MODAL
Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Σ Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Laporan Kegiatan Tim Penanaman Modal	TIM PENANAMAN MODAL
Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten Kediri	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	Σ Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	Laporan Kegiatan Tim Penanaman Modal	TIM PENANAMAN MODAL
Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen strategi Promosi Penanaman Modal Kab/Kota	Σ dokumen strategi Promosi Penanaman Modal Kab/Kota	Laporan Kegiatan Tim Penanaman Modal	TIM PENANAMAN MODAL
Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Σ Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Laporan Kegiatan Tim PTSP	TIM PTSP
Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan	Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem	Σ Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan	Laporan Kegiatan Tim PTSP	TIM PTSP

Sub-Kegiatan	Indikator	Formula	Sumber Data (Sumber Verifikasi)	Penanggung-Jawab
berusaha berbasis risiko	Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik		
Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	Σ Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	Laporan Kegiatan Tim Penanaman Modal	TIM PENANAMAN MODAL
Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	Σ Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	Laporan Kegiatan Tim Penanaman Modal	TIM PENANAMAN MODAL
Pengawasan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dilakukan Inspeksi Lapangan; serta Dilakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha	Σ Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dilakukan Inspeksi Lapangan; serta Dilakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha	Laporan Kegiatan Tim Penanaman Modal	TIM PENANAMAN MODAL

Sub-Kegiatan	Indikator	Formula	Sumber Data (Sumber Verifikasi)	Penanggung-Jawab
Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	Σ Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	Laporan Kegiatan Tim PTSP	TIM PTSP

Ditetapkan di Kediri
pada tanggal 30 - 09 - 2025

KEPALA DPMPTSP
KABUPATEN KEDIRI

JOKO SUWONO